

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Pada Bab ini penulis menjawab pertanyaan penelitian: **Bagaimana faktor ekonomi dan politik Indonesia mendorong pemerintah membuat kebijakan pertambangan tahun 2009-2018 yang tidak konsisten, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja Newmont Corporation?**

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tulisan ini ditujukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang kemudian mendorong pemerintah dalam pengambilan kebijakan pertambangan Indonesia di tahun 2009-2018. Kebijakan pertambangan tersebut antara lain adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 beserta PP turunannya. Selama 9 tahun sejak diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2009, PP turunannya yaitu PP Nomor 23 Tahun 2010 sudah diamandemen sebanyak 5 kali. Sehingga, mulai dari UU Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahan-perubahan PP berdampak terhadap kinerja salah satu perusahaan tambang asing yang berinvestasi di Indonesia, yaitu Newmont Mining Corporation yang beroperasi di PT NNT, Batu Hijau.

Sebagai negara berkembang, ekonomi dan politik Indonesia belum sepenuhnya stabil. Indonesia masih berada di tahap *take-off* dimana sudah bersedia menghadapi perkembangan-perkembangan melalui potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun belum memiliki teknologi yang memadai serta modal yang cukup. Secara ekonomi Indonesia belum mampu berdiri sendiri,

ditambah lagi dengan permasalahan ekonomi yaitu hiperinflasi sejak orde lama hingga berdampak pada orde baru. Inilah mengapa pemerintah kemudian membentuk kebijakan pada masa orde baru untuk menarik investasi asing (*FDI*) untuk merencanakan pembangunan ekonomi negara melalui KK 1967. Dari dinamika ekonomi-politik yang tidak stabil mengindikasikan pertumbuhan maupun perlambatan ekonomi dan gejolak politik yang bermunculan. Sehingga dalam hal pertambangan, pemerintah melihat potensi dari sektor tersebut untuk meningkatkan perekonomian negara seperti pada masa pembangunan Orde Baru, Reformasi, Krisis pada tahun 2008 dan perlambatan ekonomi tahun 2012-2015 yang memicu pemerintah memperbaharui kebijakan tambang.

Sebab KK 1967, selama tahun 1968-1980-an sektor tambang memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional sehingga pembangunan negara terlaksana secara efektif dan perlahan Indonesia merangkak untuk terus mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun dengan keadaan negara Indonesia yang masih berkembang, dampak dari ekonomi dan politik yang tidak stabil seperti krisis ekonomi bisa memberikan dampak yang signifikan. Sehingga, respon pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil bisa mengarah pada perubahan kebijakan dan menurut Teori Analisa Kebijakan.

Lalu, berubahnya KK 1967 menjadi UU No. 4 Tahun 2009 merupakan respon pemerintahan SBY terhadap krisis 2008 dengan membentuk kebijakan-kebijakan pada moneter, fiskal dan sektoral. Selain itu, pada UU Nomor 4 Tahun 2009 yang merupakan penambahan nilai hasil tambang dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang besar untuk membangun mesin *smelter*, sehingga

ekspor mineral mentah dilarang merupakan salah strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara melalui potensi tambang. Berdasarkan analisa penulis juga ada kemungkinan dari tekanan masyarakat Sumbawa yang masih merasa belum sejahtera sehingga, mendorong pemerintah untuk menginginkan nilai tambah dari hasil produksi tambang dengan perluasan lapangan kerja untuk masyarakat Sumbawa.

Dari kebijakan tersebut, diturunkan PP Nomor 23 Tahun 2010 yang berisi aturan pelaksanaan sektor pertambangan. Namun baik UU dan PP ini masing-masing memiliki masalah yang patut dipertanyakan. Pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pasal kontroversial pada Pasal 169, dimana poin A menyatakan KK akan terus berlaku hingga waktu kontrak habis. Namun pada poin B menyatakan bahwa KK akan disesuaikan dengan UU yang berlaku. Kedua, PP Nomor 23 Tahun 2010 yang tidak sesuai dengan fungsi dimana pada PP ini diberlakukan batas waktu ekspor mineral mentah hingga tahun 2014. Namun pada tahun 2014 terdapat revisi dari PP Nomor 23 Tahun 2010 menjadi PP Nomor 1 Tahun 2014 yang mengundur waktu pembangunan *smelter* menjadi tahun 2017. Pada tahun 2017, PP tersebut berubah lagi menjadi PP Nomor 1 Tahun 2017 yang kembali mengulur waktu pembangunan *smelter* untuk 5 tahun kedepan. Sehingga, PP ini sejak tahun 2009-2018 telah diamandemen sebanyak 5 kali.

Kebijakan tahun 2009 ini menuai kontra pada perusahaan-perusahaan tambang karena selama beroperasi di Indonesia, perusahaan menggunakan kontrak yang di tanda tangan sejak awal memulai kerjasama dengan Indonesia. Selain itu, perusahaan asing juga merasa bahwa Pemerintah Indonesia tidak adil

karena Indonesia telah diberikan investasi sebesar 2 miliar USD. Investasi dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang panjang juga membutuhkan lingkungan yang stabil dan kebijakan yang sesuai.

Bagi Newmont yang beroperasi di PT NNT, kebijakan ini menjadi sebuah ancaman karena Newmont sendiri hanya perusahaan tambang. Sehingga tugas dari perusahaan tersebut hanya sebatas produksi tambang, bukan untuk mengolah atau memurnikannya. Dari segi keuntungan, wilayah Batu Hijau yang mayoritas kandungan mineralnya adalah tembaga sebanyak 93%, apabila membangun *smelter* untuk memurnikan hanya sebesar 7% maka perusahaan yang memiliki naluri profit target tidak mendapatkan keuntungan. Namun, Newmont yang sudah pernah berhadapan dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 merasa kondisi akan semakin sulit apabila menjadi oposisi pemerintah sehingga Newmont tetap mengikuti peraturan dari kebijakan.

Dari kebijakan tahun 2009 yang membatasi pembangunan *smelter* hingga tahun 2014 berakibat pada penurunan kinerja Newmont di PT NNT. Ketika sudah tidak diperbolehkan untuk memproduksi, segala aktivitas di PT NNT menurun drastis terutama dari segi keuangan. Penurunan produksi sudah dimulai sejak kebijakan tahun 2009 diberlakukan, sejak tahun 2010 hingga 2014 secara berangsur-angsur produksi terus menurun yang ditunjukkan produksi pada tahun 2010 sebanyak 891.765 *dmt* menjadi 289,877 *dmt*. Aktivitas truk yang berasal dari 111 truk menjadi hanya 8 truk dan para pekerja hanya *standby* karena tidak ada aktivitas yang dapat dilakukan. Sementara itu, PT NNT tetap harus membiayai

para pekerjanya 25 kali dari setahunnya. Perubahan produksi yang drastis berpengaruh terhadap keuangan PT NNT,

Lalu pada tahun 2015 produksi kembali berlanjut karena dikeluarkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan perpanjangan waktu pembangunan *smelter*. Pemberlakuan PP ini juga bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat pada tahun 2014. Karena masih tidak ada kejelasan dari kebijakan pemerintah, maka pada akhirnya Newmont memilih untuk menyelesaikan kerjasamanya di Indonesia dan PT NNT beralih nama, karena sepenuhnya kini dimiliki oleh negara (Medco Energy) menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Temuan utama yang penulis dapat adalah kebijakan pertambangan 2009-2018 yang tidak konsisten dari UU Nomor 4 Tahun 2009 dan turunannya mengenai pelarangan ekspor mineral mentah dan batas waktu pembangunan *smelter* menyebabkan Newmont memutuskan kerjasamanya dengan Pemerintah Indonesia. Sehingga, kedepannya Indonesia dapat mengalami kesulitan untuk mendapatkan investasi asing berskala besar. Dinamika kondisi ekonomi dan politik pada negara berkembang mempengaruhi pada kebijakan yang tidak konsisten membuat perusahaan asing enggan melakukan investasi di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang dan berskala besar. Selain itu, perubahan dari KK 1967 menjadi UU No. 4 Tahun 2009 masih bersifat rancu dan tidak jelas keberpihakannya, sehingga Newmont merasakan kerugian dari pengimplementasian kebijakan pertambangan Indonesia 2009-2018.

Hal ini ditunjukkan ketika pemerintah bersikeras menetapkan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010. Namun dari Pasal 169 tidak jelas kepada siapa keberpihakan poin-poin tersebut yang terlihat masih sangat bias. Kemudian, PP Nomor 23 Tahun 2010 yang sudah membatasi waktu dan berhasil menghentikan ekspor mineral mentah oleh PT NNT pada tahun 2014 malah kembali diundur. Alasan dari hal tersebut dikarenakan dari segi kondisi ekonomi dan politik, pemerintah masih membutuhkan bantuan asing di Indonesia untuk mengembangkan perekonomian negara atau kepentingan pemerintah lainnya.

Akan tetapi, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian selalu menjadi kontributor paling kecil dibandingkan sektor lainnya dalam PDB. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pemerintah (khususnya Jokowi) kedepannya sudah tidak terlalu mengandalkan sektor pertambangan karena bukan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sehingga, sektor-sektor seperti pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersifat berkelanjutan. Dari pemaparan permasalahan ekonomi dan politik yang tidak stabil yang berpengaruh terhadap kebijakan terhadap pertambangan atau investasi asing yang inkonsisten berakibat terhadap enggannya investor menanam modal di Indonesia, terutama dalam jumlah yang sangat besar. Perencanaan-perencanaan pemerintah untuk pembangunan negara tentunya dibarengi dengan niatan yang positif.

Tulisan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini berdasarkan data-data yang penulis melalui studi pustaka dan wawancara. Meski begitu, ada pula sudut pandang lain yang tidak diteliti oleh penulis yaitu penilaian pihak lain terhadap Newmont, sehingga penulis membuka saran-saran sebagai penyempurna tulisan

ini. Skripsi merupakan tulisan ilmiah yang berguna bagi studi ilmu Hubungan Internasional yang mempelajari mengenai konsep *FDI* dan ekonomi politik Indonesia yang berguna untuk referensi dalam mata kuliah Politik dan Bisnis Internasional dan Ekonomi dan Politik Internasional.

Perencanaan-perencanaan pemerintah untuk pembangunan negara tentunya dibarengi dengan niatan yang positif. Dalam hal ini, pemerintah masih optimis bahwa perubahan kebijakan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, baik Pemerintah Indonesia (khususnya di periode SBY dan Jokowi) memiliki perspektif yang berbeda, dimana Newmont beralih pada KK sedangkan Pemerintah Indonesia beralih pada UU. Sehingga perlunya peraturan tambang dipertegas dengan dijaga masa keberlangsungannya sehingga tidak berubah sesuai dengan kondisi tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Pembangunan oleh Rostow untuk menggambarkan pembangunan negara berkembang seperti Indonesia yaitu pada tahap ketiga yaitu *take off*. Namun, kini Indonesia sudah semakin maju dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Sehingga, penulis membuka masukan maupun saran agar penelitian ini dapat mencapai hingga tahap *the Age of Maturity*, yaitu tahap kelima dari Teori Pembangunan sehingga penelitian ini dapat disesuaikan dengan waktu terkini, khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakry. Umar Suryadi, "Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional", hal. 26-27 (Jakarta:2016), deepublish.
- Cresswell. John W, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches: Third Edition", hal. 32, (London:2009), Sage Publication
- Dunn, Public Policy Analysis, Pearson New International Edition, (Essex:2014), Pearson, Hal. 5-8.
- Mankiw. N. Gregory, "*Pengantar Ekonomi Makro*", Asian Edition, Vol. 2, (London: Harvard University, CENGAGE Learning, 2008, hlm. 53-55.
- Robert J. Carbaugh, "*International Economics*" 13<sup>th</sup> Edition, (Central Washington University, South Western CENGAGE Learning, 2011, hlm. 231 & 311.
- W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Third Edition, 36-40, Chapter 4: Take-Off, Cambridge University Press (Cambridge:1990).

### Jurnal

- Chaudhuri. Sarbajit, Mukhopadhyay. Ujjaini, "*Role of FDI in Developing Countries: Basic Concepts and Facts*", University of Calcutta, Behala College, 10.1007/978-81-322-1898-2\_2, (2014),



[https://www.researchgate.net/publication/300251508\\_Role\\_of\\_FDI\\_in\\_Developing\\_Countries\\_Basic\\_Concepts\\_and\\_Facts](https://www.researchgate.net/publication/300251508_Role_of_FDI_in_Developing_Countries_Basic_Concepts_and_Facts), diakses pada tanggal 20 Februari 2019

Dr. Jhon Gow, "Development Theory: Rostow's Five-Stage Model of Development and 1<sup>st</sup> Relevance In Globalization, School of Social Science Faculty of Education and Arts The University of Newcastle <https://pdfs.semanticscholar.org/89da/96a65d5cda93fdbb0798d95d290ffa35fedc.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.

John H. Dunning, "*The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future*", *International Journal of the Economics of Business*, Vol 8, Issue 2, DOI:10.1080/13571510110051441, (2001), hlm. 173-190.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Pardede. Marulak, "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara" (Jakarta: 2016), p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/312>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

Kusluvan. Salih, "*A Review of Theories of Multinational Enterprises*", D.E.Ü.I.İ.B.F. Dergisi Cilt:13, Sayı:1, (1998), hlm. 163-180.

Maria Contesa. Sintaningrum. Mudiwati R, "Smelter: Inkonsistensi Kebijakan, Kendala dan Dampak di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1, 2018, Hal. 1, <http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/19095/8924>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Said. Moh, "*Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*", *JIAP* Vol. 3, No. 3, pp 184-190, ISSN 2302-2698, (2017) <file:///Users/premiereshouse/Downloads/719-2685-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019

Sandy Pratama, "Dimensi Ekonomi Politik dalam Dunia Pertambangan", Vol 3. No 1 Tahun 2018.

W. W. Rostow, The Take-Off Into Self-Sustained Growth, *The Economic Journal*, Volume 66, Issue 261, 1 March 1956, Pages 25, <https://doi.org/10.2307/2227401>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

### **Laporan Resmi**

Bank Indonesia: Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, "Laporan Pemetaan Sektor Ekonomi (Sektor Pertambangan)", 2006, hal. 13

Bank Indonesia, "Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2009", Hal. 5.

- Bank Indonesia, “Laporan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010: Bab I – Perekonomian Indonesia: Pengaruh Global, Kinerja Domestik dan Respons Kebijakan”
- Bank Indonesia, Laporan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012: Bab 3 Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, hal. 59.
- Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014”, hal. 42.
- Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2015”, hal. 43.
- Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2017”, hal. 20.
- Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2016”, hal. 42.
- Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Indonesia 2018”, hal. 25.
- BPS, “Jumlah Produksi Konsentrat Hasil Pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014”, <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/statictable/2015/11/03/38/jumlah-produksi-konsentrat-hasil-pertambangan-pt-newmont-nusa-tenggara-di-kabupaten-sumbawa-barat-tahun-2014.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.
- BPS, “Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2014”, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/07/02/1202/-seri-2000-laju-pertumbuhan-pdb-atas-dasar-harga-konstan-2000-menurut-lapangan-usaha-persen-2000-2014.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.
- DPR RI: Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, “Capaian Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Indonesia”, [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_CAPAIAN\\_PERTUMBUHAN\\_EKONOMI\\_BERKUALITAS\\_DI\\_INDONESIA20140821142017.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_CAPAIAN_PERTUMBUHAN_EKONOMI_BERKUALITAS_DI_INDONESIA20140821142017.pdf), diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.
- Kementerian ESDM, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian ESDM”, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-kementerian-esdm-tahun-2011.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.
- Kementerian Keuangan, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm>, diakses pada tanggal 4 November 2019.
- Presiden RI, “PP RI Nomor 1 Tahun 2014”, <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/PP%20No.%201%20Thn%202014.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

- Presiden RI, “PP RI Nomor 23 Tahun 2010”,  
<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/PP%20No.%2023%20Thn%202010.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.
- Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”,  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.HTM>, diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Presiden RI, “UU Nomor 1 Tahun 1967”.
- Publish What You Pay Indonesia, “Tambang Batu Hijau, Indonesia – Laporan Naratif”,  
[https://pwybindonesia.org/wp-content/uploads/2016/11/Narrative-Summary\\_Batu-Hijau\\_Indonesia-Bahasa.pdf](https://pwybindonesia.org/wp-content/uploads/2016/11/Narrative-Summary_Batu-Hijau_Indonesia-Bahasa.pdf), diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Rancak. Gendewa Tunas, “Mengintip Aktifitas Pertambangan di Wilayah Pesisir”, Studi Kasus: Batu Hijau, Newmont Nusa Tenggara.

### **Website**

- Berita Satu, “Newmont Nusa Tenggara Klaim Berikan Kontribusi Ekonomi Rp 90 Triliun”,  
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/182554/newmont-nusa-tenggara-klaim-berikan-kontribusi-ekonomi-rp-90-triliun>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Bisnis.com: Ekonomi, “Produksi Emas dan Tembaga Newmont Nusa Tenggara Melonjak”,  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160219/44/520914/produksi-emas-dan-tembaga-newmont-nusa-tenggara-melonjak>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Bisnis.com: Ekonomi, “PT Newmont Nusa Tenggara: Target Produksi 2015 Bakal Tercapai”,  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20151205/44/498873/pt-newmont-nusa-tenggara-target-produksi-2015-bakal-tercapai>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- CNBC Indonesia, “Pasal-Pasal di Kontrak Freeport ini yang Bikin RI Ribet”,  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180717200138-4-24052/pasal-pasal-di-kontrak-freeport-ini-yang-bikin-ri-repot>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.
- CNBC Indonesia, “Soekarno Tolak, Soeharto Teken Kontrak, Jokowi Rebut”,  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180712154150-4-23248/freeport-sukarno-tolak-soeharto-teken-kontrak-jokowi-rebut>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.
- CNN Indonesia, “Inkonsistensi Regulasi jadi Masalah Utama Industri Tambang”,  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161109143622-85->

- 171469/inkonsistensi-regulasi-jadi-masalah-utama-industri-tambang, diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Databooks, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2008-2018)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/21/20-tahun-setelah-reformasi-ekonomi-indonesia-tumbuh-sekitar-5>, diakses pada tanggal 27 November 2019.
- Detik Finance, “Pengusaha Keberatan Bangun Smelter Karena Mahal, Apa Kata Pemerintah?”, <https://finance.detik.com/energi/d-2678282/pengusaha-keberatan-bangun-smelter-karena-mahal-apa-kata-pemerintah>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Detik Finance, “Perkara Arbitrase Pemerintah dengan Newmont Bukan Pertama Kalinya”, <https://finance.detik.com/energi/d-2629402/perkara-arbitrase-pemerintah-dan-newmont-bukan-pertama-kalinya>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- DetikFinance, “Tambang Emas dan Tembaga Newmont Tutup Operasi, Situasi Sepi”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2608818/tambang-emas-dan-tembaga-newmont-tutup-operasi-situasi-sepi>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Down to Earth, “Raksasa Tambang Beruntung karena Krismon”, <http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/39imi.htm>, diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Dunia Energi, “Lepas Tambang Batu Hijau, Kini Newmont Perusahaan Emas Terbesar di Dunia”, <https://www.dunia-energi.com/lepas-tambang-batu-hijau-kini-newmont-perusahaan-emas-terbesar-di-dunia/>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Hukum Online, “Membongkar Kerancuan Regulasi Minerba di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cf8ccc54b2d/membongkar-kerancuan-regulasi-minerba-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.
- Hukumonline, “Mencermati Posisi Freeport dari UU Minerba, Kontrak Karya, serta MoU”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d8b4379df18/mencermati-posisi-freeport-dari-uu-minerba--kontrak-karya--serta-mou/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.
- Indonesia Investments, “Keajaiban Orde Baru Soeharto Indonesia”, <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247?>, diakses pada tanggal 27 November 2019.
- Indonesia Investments, “Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter”, <https://www.indonesia->

- investments.com/id/budaya/politik/orde-baru-suharto/item180, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.
- Kementerian Perindustrian, “Dua Perusahaan Investasi Smelter US 6,2\$”, [https://kemenperin.go.id/artikel/8336/Dua-Perusahaan-Investasi-Smelter-US\\$-6,2-Miliar](https://kemenperin.go.id/artikel/8336/Dua-Perusahaan-Investasi-Smelter-US$-6,2-Miliar), diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Kementerian Perindustrian, “Newmont Cabut Gugatan ke Arbitrase Internasional”, <https://kemenperin.go.id/artikel/9915/Newmont-Cabut-Gugatan-Ke-Arbitrase-Internasional>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Kompas.com, “Front Mahasiswa Sumbawa Demo Tolak PT Newmont”, <https://tekno.kompas.com/read/2012/07/04/18035433/front.mahasiswa.sumbawa.demo.tolak.pt.newmont>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Kompas.com, “Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa”, <https://ekonomi.kompas.com/jeo/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>, diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Kompas.com, “Mengurai Transparansi Hasil Divestasi Saham PT Newmont”, <https://regional.kompas.com/read/2018/01/30/23501101/mengurai-transparansi-hasil-divestasi-saham-pt-newmont>, diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Kontan: Liputan Khusus Freeport, “Karpas Merah Kontrak Karya dari Rezim Orba”, <https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/read/301/Karpas-merah-Kontrak-Karya-dari-rezim-Orba->, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.
- Medcom.id, “IRESS: PP Nomor 23 Tahun 2010 Melanggar Konstitusi”, <https://www.medcom.id/ekonomi/energi/VNnDXLjk-iress-pp-nomor-23-tahun-2010-melanggar-konstitusi>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.
- Medcom.id, “Pemerintah Setuju Pencabutan Gugatan Arbitrase Newmont”, <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/4KZe2ewk-pemerintah-setuju-pencabutan-gugatan-arbitrase-newmont>, diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Merdeka.com, “Gugatan Newmont Bahayakan Kedaulatan Indonesia”, <https://www.merdeka.com/uang/gugatan-newmont-bahayakan-kedaulatan-indonesia.html>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Mongabay, “Warga Sekitar Newmont yang Kehilangan Hutan dan Hidup dalam Kemiskinan”, <https://www.mongabay.co.id/2013/08/26/warga-sekitar-newmont-yang-kehilangan-hutan-dan-hidup-dalam-kemiskinan/>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Newmont GoldCorp, “Our Business”, <https://www.newmontgoldcorp.com/why-newmont/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

- Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, “PUSHEP Menilai Pemerintah Inkonsisten Jalankan UU Minerba”, [http://pushep.or.id/view\\_jurnal.php?category=Migas&id=51#.Xd6izd8wiCQ](http://pushep.or.id/view_jurnal.php?category=Migas&id=51#.Xd6izd8wiCQ), diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Tempo.Co, “NTB Tagih MoU Newmont-ESDM”, <https://nasional.tempo.co/read/605067/ntb-tagih-mou-newmont-esdm>, diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Tempo.co: Bisnis, “Pemerintah Gugat Newmont ke Arbitrase”, <https://bisnis.tempo.co/read/118498/pemerintah-gugat-newmont-ke-arbitrase>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Tempo.co, “PT Newmont Diminta Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat”, <https://bisnis.tempo.co/read/325480/pt-newmont-diminta-perhatikan-kesejahteraan-masyarakat>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Sindo, “BPS Ungkap Penyebab Ekonomi Nusa Tenggara Tumbuh Terendah”, <https://ekbis.sindonews.com/read/1202756/33/bps-ungkap-penyebab-ekonomi-nusa-tenggara-tumbuh-terendah-1493968882>, diakses pada tanggal 17 November 2019.
- Sumitomo Coporation, “Sumitomo Corporation Enters Agreements to Sell Its Interest in Batu Hijau Copper/Gold Mine”, [https://www.sumitomocorp.com/en/jp/news/release/2016/group/20160701\\_1](https://www.sumitomocorp.com/en/jp/news/release/2016/group/20160701_1), diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.
- Voa Indonesia, “Indonesia Gali Lubang Sendiri dengan UU Pertambangan Baru”, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-gali-lubang-sendiri-dengan-uu-pertambangan-baru/1517891.html>, diakses pada tanggal 10 September 2019.